



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. SOLEH**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **497402**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 706.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 1715 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 36.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/100 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah Seluas 135 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
6. Tanah Seluas 264 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 655.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC 2018 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA ADV MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000



5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 151.802.388

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.540.302.388

III. HUTANG Rp. 324.918.008

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.215.384.380

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.